PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus di Kantor Wilayah Jawa Barat 1)

The Influence Of Tax Revenue to Tax Collection and Implications On Regional Economic Growth

Disusun oleh:
Ayu Yudiawati 2.11.09.063
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

A country is considered to be developed when the economic growth increases as well as the raise of Gross Domestic Product. The raise is expected to increase the tax revenue due to the importance of tax sector in a country economy. Tax revenue can be used as the national income for the government to support economy of a country. With this reason, higher tax revenue is expected by the government and cannot be separated from the way of tax officials in collecting the tax.

The aim of this study is to find out the influence of tax billing towards tax revenue as well as the impact of tax revenue on the economic growth in Tax Office of West Java Region I. The method used in this research is descriptive and verificative. The descriptive method was used to figure out the tax billing, tax revenue and economic growth. Whilst, the verificative method was applied to find out the influence of tax billing towards the tax revenue as well as the impact of tax revenue towards the economic growth by using statistic testing. The testing used was the calculation of correlation and analytical stripes, determination coefficient, hypothetical testing bu using SPSS Software 20.0.

The result of this study shows that tax billing has direct influence towards tax revenue as well as the tax revenue towards the economic growth.

Keywords: Tax billing, Tax revenue, Economic growth

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga golongan dengan menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam suatu perekonomian salah satunya yaitu Pemerintah (Sadono Sukirno, 2008: 36). Masih menurut Sadono Sukirno (2008), pemerintah merupakan salah satu badan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi seperti kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi dan sosial sehingga peranan pemerintah cukup aktif dalam kegiatan ekonomi karena tanpa campur tangan pemerintah maka kondisi perekonomian tidak akan seimbang.

Dengan pertumbuhan dan proses perekonomian yang baik dan berkelanjutan maka dapat dijadikan sebagai kondisi utama bagi pembangunan ekonomi, selain masalah ekonomi pemerintah juga harus dapat melakukan beberapa hal terutama dalam masalah hukum dan politik karena dengan kondisi hukum dan pemerintahan yang kondusif maka akan menunjang jalannya Pembangunan ekonomi yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar Pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 5).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikatakan sudah tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir namun tingkat pertumbuhannya tidak diikuti dengan tingkat kualitasnya karena tidak bertumpu pada sektor riil sebagai penghasil barang yang bersifat padat karya sehingga Pertumbuhan Ekonomi kini lebih banyak digerakkan oleh sektor jasa dan keuangan yang berdampak pada munculnya pengangguran dan ketimpangan (Ali Masykur Musa, 2012). Situasi perekonomian di Indonesia terlihat meningkat mencapai 6,4 persen, tapi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja yang

mengakibatkan besarnya jumlah pengangguran hampir sebesar 6,32 persen (Firdaus Badrun, 2012). Tapi disisi lain pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,8 persen sesuai dengan APBN 2013 dengan melakukan investasi langsung, meningkatkan konsumsi dalam negeri dan tentunya dengan strategi peningkatan pendapatan baik itu dari sektor pajak maupun non pajak (Hatta Rajasa, 2012).

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun, dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) penerimaan pajak juga dapat dikatakan meningkat karena pemerintah dapat menetapkan rencana penerimaan pajak lebih pasti jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahun (Herman, 2007). Produk Domestik Bruto memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak di Indonesia, Peningkatan Produk Domestik Bruto dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kemudian meningkatkan pendapatan per kapita yang akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara (Rahmananta, 2012).

Perubahan dalam penerimaan pajak atau kebijakan pajak untuk setiap jenis pajak tentu akan memberikan perubahan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tabungan bruto dan pendapatan asing domestik (Taufik Abdul Hakim dan Imbarine Bujang, 2011).

Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh tarif pajak *(tax ratio)* dan basis pajak *(tax based)*, peranan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya tentu menjadi faktor utama dalam pencapaian Penerimaan Pajak agar sesuai dengan harapan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional terutama dalam sektor perekonomian (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25), penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diharapkan bagi pemerintah karena sektor pajak memiliki posisi yang sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara sehingga tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara, sesuai dengan fungsi pajak *(Budgetair)* yaitu sebagai sumber dana bagi negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan yang akan menunjang tumbuhnya perekonomian, segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana umum merupakan biaya yang berasal dari pajak oleh karena itu pajak sebagai pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga Agustus 2012 mencapai Rp 519,7 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,7 persen, realisasi ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak 2011 yang mencatat 18,27 persen, hal ini dinilai merupakan salah satu tanda mulai terasanya dampak krisis ekonomi global (Robert Pakpahan, 2012). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan target penerimaan pajak sebesar Rp 885,5 triliun tahun ini sulit tercapai dikarenakan tren penerimaan pajak pada akhir tahun cenderung menurun bahkan masih jauh dari harapan karena rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pajak (Fuad Rahmany, 2012). Selain itu target penerimaan pajak terutama untuk APBN 2013 dinilai tidak terealisir yang disebabkan kurangnya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penagihan pajak dan juga kurangnya pemerintah mengelola dengan baik penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Final dari perusahaan-perusahaan (Roni Bako, 2012). Pemerintah melaporkan penerimaan pajak sejauh ini mencapai sekitar Rp 490 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 sebesar Rp 577,3 triliun. Realisasi tersebut kira-kira sebesar 92-93% dari target APBNP 2009. (Mochammad Tjiptardjo , 2009). Bahkan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 relatif masih rendah, hingga awal November realisasi baru sekitar 75 persen dari target atau sekitar Rp 663 triliun, sehingga pemerintah harus terus menggenjot setoran pajak hingga Rp 221 triliun untuk mencapai target, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi agar target penerimaan pajak dapat tercapai (Agus Martowardojo, 2012).

Untuk mendapatkan sumber pembiayaan negara yang tinggi maka pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, kebijakan pemerintah menaikkan pajak ditengah kondisi ekonomi yang sedang krisis akan beresiko tinggi kepada para perusahaan, resiko

mengalami kebangkrutan sangat tinggi yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi perekonomian hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah perusahaan sehingga penerimaan pajak pun ikut berkurang dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu akan terjadi *trade-off* antara kenaikan pajak dan penurunan pendapatan pemerintah, salah satu hal yang mendasari terjadinya *trade-off* ini yaitu efek aritmatika karena pada dasarnya besarnya pendapatan negara merupakan akibat dari tingginya penerimaan pajak namun hal itu akan mengalami titik jenuh bahkan menjadi efek negatif terhadap penerimaan karena jika kenaikan pajak semakin tinggi maka semakin melemahkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan semakin menurunkan penerimaan pemerintah maka, kebijakan pemerintah dalam penetapan pajak perlu kehati-hatian agar tidak membebani perusahaan tetapi tetap berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan memacu pertumbuhan ekonomi (Rizal Ritonga, 2009).

Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dengan menyediakan berbagai prasarana ekonomi untuk menunjang perekonomian yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Waluyo, 2007:3).

Pendekatan pajak dari sisi ekonomi seyogyanya memadukan antara sisi mikroekonomi yang mengutamakan individu dengan sisi makro yakni bagi kepentingan masyarakat secara bersama-sama, dimana pajak-pajak didalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti untuk menggairahkan ekspor, untuk menekan inflasi dan lain sebagainya, akan tetapi pengenaan pajak juga diharapkan tidak mengabaikan sisi mikroekonomi karena bagaimana pun juga kemampuan rakyat yang memikul beban pajak perlu diperhatikan sekalipun semua hasil pajak akan kembali untuk memenuhi kebutuhan bersama (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:32).

Kewajiban pajak muncul dari sisi wajib pajak karena undang-undang, kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi karena pada dasarnya penagihan pajak berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak (Soemarso S.R, 2007:13).

Masih menurut Soemarso (2007), tindakan penagihan pajak dalam ajaran formal dimulai pada saat utang pajak telah timbul atau dengan kata lain dalam ajaran ini surat ketetapan pajak merupakan administrasi formal bagi setiap utang pajak yang timbul, penagihan dalam arti tindakan memaksa baru dilakukan setelah itu, yaitu jika jumlah dalam surat ketetapan pajak tersebut tidak dibayar.

Penagihan pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif, penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran seperti surat peringatan dan surat teguran, sedangkan penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar seperti surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak dan surat paksa, tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim (Soemarso, 2007:14).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui, saat ini kemampuan pegawainya dalam melakukan penagihan piutang atau tunggakan pajak masih sangat kurang. Terutama untuk menghadapi wajib pajak yang bersikap preman (Fuad Rahmany, 2012). Selain itu juga Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 6.368.662 wajib pajak yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya hingga 30 April 2010 lalu, maka dari itu pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT ini, dengan menerbitkan dan mengirimkan teguran, imbauan, surat tagihan pajak (Petrus Tambunan, 2010). Selain itu juga Jumlah piutang pajak per 31 Desember 2011 mencapai Rp 86,8 triliun, dari nilai piutang pajak tersebut terdapat penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp46,2 triliun sehingga nilai netto Piutang Pajak yang diperkirakan dapat ditagih sebesar Rp40,59 triliun atar sekitar 46,2% dan sisanya belum tertagih (Agus Martowardojo, 2012).

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah untuk maksud rencana penyusunan skripsi. Adapun pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam

penelitian ini adalah Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun kegunaan dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan implikasinya pada Pertumbuhan Ekonomi. pada Kanwil Jabar 1.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Penagihan Pajak dapat diartikan sebagai Serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak (Rochmat Soemitro 1991). Penerimaan Perpajakan dapat diartikan sebagai Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi 2003). Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya (Jhingan 2008).

Penagihan Pajak berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penerimaan pajak badan (Zakiyah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto 2008). Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi (Soemarso S.R 2007).

Adanya keterkaitan antara Penerimaan Pajak yang terdiri dari Pajak Langsung dan Tidak Langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi, yang mengacu pada gagasan bahwa Pajak Langsung merugikan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pajak Tidak langsung tidak merugikan dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa *output rill* positif berkaitan dengan pajak tidak langsung sedangkan pajak langsung tidak berpengaruh signifikan, hasil ini menyiratkan efek positif dari transformasi dalam komposisi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode yang terlibat (Ibrahim Arisoy dan Ilter Unlukaplan (2010).

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Objek dalam Penelitian ini adalah Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. Mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan yaitu Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan seberapa besar pengaruh penerimaan pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono (2011: 147).

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. (Mashuri dalam Umi Narimawati (2010). Adapun design penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh melalui pengukuran variabel -variabel penelitian (tabel 3.2).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan *(Library Reseach).* Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono 2011). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono 2011). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis korelasi dan determinasi.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan untuk menentukan keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dari data sampel, bukan data sensus (Cooper and Schindler 2006). Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan nilai koefisien korelasi dapat dilihat bahwa keterkaitan atau hubungan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,461 dan masuk dalam kategori sedang dengan arah positif yang artinya penagihan pajak memilki pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Jawa Barat 1, semakin sering dilakukan penagihan pajak maka cenderung diikuti dengan penerimaan pajak yang semakin besar. Kemudian hubungan antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,666 dan masuk dalam kategori kuat dengan arah positif yang artinya penerimaan pajak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kantor Wilayah Jawa Barat 1, semakin besar jumlah penerimaan pajak maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada sub struktur yang pertama variabel penagihan pajak berperan sebagai variabel bebas (independen), dan penerimaan pajak sebagai variabel penyela/antara (intervening). Karena variabel independen hanya satu variabel (penagihan paak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

Nilai koefisien jalur sebesar 0,461 merupakan nilai koefisien jalur penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (tabel 4.6). Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kanwil Jabar 1. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,213 diinterpretasikan sebagai besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 21,3% terhadap penerimaan pajak pada Kanwil Jabar 1 (tabel 4.7), sementara sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penagihan pajak (gambar 4.3), antara lain kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakaan, kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan, system administrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan kepahaman warga negara akan pajak serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, intergitas, moral tinggi) (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Pada sub struktur yang kedua variabel penerimaan pajak sebagai variabel penyela/antara (intervening) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh hasil koefisien jalur penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,666 dan masuk dalam kategori kuat dengan arah positif (tabel 4.8) Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,444 diinterpretasikan sebagai besar pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (tabel 4.9). Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,4% terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah masing-masing Kanwil Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat 1 sementara sisanya sebesar 55,6% merupakan pengaruh factor-faktor diluar penerimaan pajak (gambar 4.4) antara lain tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro:2004), kemajuan teknologi, persediaan barang yang terus meningkat dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien (Jhingan, 2000:57) turut berperan dalam terwujudnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 21,3% atau sebesar 0,461 dan masuk dalam kategori sedang, arah hubungan positif antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak maka cenderung diikuti dengan penerimaan pajak yang semakin besar pada Kantor Wilayah Jawa Barat 1.
2. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin besar penerimaan pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja m asing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Penerimaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,4% atau sebesar 0,666 dan masuk dalam kategori kuat, arah hubungan positif antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penerimaan pajak cenderung diikuti dengan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada Kantor Wilayah Jawa Barat 1.

b. Saran

1. Penerimaan pajak dapat mencapai target apabila DJP dapat melakukan penagihan pajak dengan baik. Penagihan pajak yang baik guna meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak dapat dilakukan seperti melakukan sensus pajak. Sensus pajak merupakan salah satu bentuk proses pengumpulan data Wajib Pajak untuk penggalian potensi perpajakan. karena sampai saat ini masih sangat banyak orang pribadi dan perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sensus pajak akan mendata para Wajib Pajak atau objek pajak yang berada di sentra bisnis dan perumahan, selain sensus pajak, registrasi ulang bagi pengusaha kena pajak perlu dilakukan karena Selama ini status PKP rawan disalahgunakan oleh pengusaha dengan menerbitkan faktur pajak fiktif.
2. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target apabila diikuti dengan tercapainya target penerimaan pajak. Hal ini lebih baik jika DJP dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, pasalnya saat ini masih banyak masyarakat yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak seperti melakukan penegakan hukum dibidang perpajakan seperti pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak dengan tujuan untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi relevan serta membayar pajak pada waktunya. Selain itu juga Pertumbuhan ekonomi yang melambat tentu akan berpotensi menurunkan penerimaan negara melalui pajak, karena sektor pajak akan terkena dampaknya secara langsung terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Hal tersebut karena diperkirakan transaksi perdagangan akan mengalami penurunan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agus Martowardojo. 2012.*Realisasi Pajak baru 75 persen*.http://www.jjpn.com/read/2012/11/21/147560/Realisasi-Pajak-Baru-75Persen , Rabu 21 November 2012| 03:49.

Agus Martowardojo.2012. *Pemerintah Tidak Mampu Tagih Tunggakan Pajak Rp 46,2 Triliun*. http://finance.detik.com /read/2012/07/05/120413/1958260/ 4/pemerintah-tidak-mampu-tagih-tunggakan-pajak-rp-462-triliun

Ali Masykur Musa. 2012. *Ekonomi Indonesia Tumbuh tapi belum Berkualitas*. http://jaringnews.com/ekonomi/umum/26345/ekonomi-indonesia-tumbuh-tapi-belum-berkualitas.

Andi Supangat.2007.*Statistika dalam Kajian Deskriptif,Inferensi dan Nonparametik*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Barry Poulson,W.& Jules,Gordon Kaplan.2008.*State income Taxes And Economic Growth.*Cato Journal,Vol.28.No.1 (Winter 2008).

Boediono.2009.*Teori Pertumbuhan Ekonomi*.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

Engkos Achmad Kuncoro dan Riduwan.2007.*Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*.Bandung:Alfabeta

Erly Suandi .2006.*Perencanaan Pajak*.Jakarta :Salemba Empat.

Firdaus Badrun. 2012. *Empat Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia*. http:// kampus.okezone.com/read/2012/09/20/373/692735/empat-masalah-ketenagakerjaan-di-indonesia.

Fuad Rahmany. 2012. *Pajak Kekayaan belum saatnya diterapkan*. www.beritasatu.com/ekonomi/89523-pajak-kekayaan-belum-saatnya-diterapkan.html, Rabu, 26 Desember 2012| 08:27.

Fuad Rahmany.2012. *8 Pokok Kebijakan Pajak*. http:// economy.okezone.com /read/2012/09/24/20/694356/8-pokok-kebijakan-pajak, Senin, 24 September 2012| 16:47

Ibrahim, Arisoy & Ilter,Unlukaplan.2010. *Tax Composition And Growth in Turkey:An Empirical Analysis*. International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 59(2010).

Jhigan,ML.2008.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada *Karya Ilmiah.* Bekasi: Genesis.

Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press

Kusnendi. Drs., M.Si.2002.*Teori Makro Ekonomi "Model Fluktuasi Ekonomi Jangka Pendek".* Bandung: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.

Mankiw, N.G. 2000. *Pengantar ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Pudyatmoko,Y, Sri 2009. *Pengantar hukum perpajakan.* Yogyakarta:Andi.

Rahmananta. 2009. *Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*.

Rizal Ritonga. 2009. *Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi*. http://www .unisosdem. org/ekopol_detail.

Robert Pakpahan. 2012. *Krisis Global Tekan Pertumbuhan Penerimaan Pajak*. http://www.beritasatu.com/ekonomi/72443-krisis-global-tekan-pertumbuhan-penerimaan-pajak.html.

Roni Bako. 2012. *Target Penerimaan Pajak dalam APBN 2013 tidak realistis.* http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/29/83947/target_penerimaan_pajak_dalam_apbn_2013_tidak_realistis/, Senin, 29 Oktober 2012|00:03.

Sadono Sukirno. 2008. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. 1997. *Ekonomi.* Jakarta: Erlangga

Simanjuntak,H.T ,Dr & Dr R,Imam Mukhlis.2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta :Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Siti Kurnia Rahayu 2009.*Konsep & Aspek Formal,*Yogyakarta:Graha Ilmu

Soemarso S.R. 2007.*Akuntansi Suatu Pengantar*.Salemba Empat : Jakarta

Sony Devano & Siti Kurnia.R.2006.*Konsep,ilmu dan Isu*.Jakarta:Kencana

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, *dan* R&D,Bandung: Alfabeta.

Sumitro Djojohadikusumo.2007.*Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Suryadi. 2003. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak

dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerima Pajak Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1.*

Taufik, Abdul Hakim.& Imbarine,Bujang.2011.*The Impact and Consequences of Tax Revenue's Components on Economic Indocator:Evidence from Panel Group Data.*International Research Journal of finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 63(2011).

Tulus T.H. Tambunan 2009. *Perekonomian Indonesia*.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Umi Narimawati., Sri, Dewi. Anggadini., Linna, Ismawati.2010. *Penulisan Karya Ilmiah.*Bekasi:Genesis.

Waluyo.2007. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 7. Jakarta:Salemba Empat.

Young, Lee & Roger,H.Gordon.2005.*Tax Structure And Economic Growth.*Journal of Public Economics 89 (2005).

Zakiah M Syahab & Hantoro Arief Gisijanto. (2008).*Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis,13(2).

VII. LAMPIRAN

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode yang digunakan	Unit Analisis	Time Horizon
T-1	Verifikatif analysis	*Verifikatif*	KPP	*Cross Sectional*
T-2	Verifikatif analysis	*Verifikatif*	KPP	*Cross Sectional*

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Penagihan Pajak (X)	Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak" (Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2006:174).	Jumlah Tagihan Pajak Tahun 2011 (Siti Kurnia Rahayu 2009:186)	Rasio
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak meru- pakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan(Suryadi,2003:1).	Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2011	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Pertumbuhan ekonomi mer- upakan penambahan PDB	Laju Produk Domestik Regional Bruto	Rasio

	yang berarti juga penambah-an pendapatan nasional. (Tambunan, 2009: 44).		

Tabel 4.5

Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	Y	X
Pearson Correlation	Z	1.000	.666	.170
	Y	.666	1.000	.461
	X	.170	.461	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.002	.265
	Y	.002	.	.036
	X	.265	.036	.
N	Z	16	16	16
	Y	16	16	16
	X	16	16	16

Tabel 4.6

Koefisien jalur penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.315E+11	5.429E+11		-.242	.812
	X	9.494	4.882	.461	1.945	.072

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.7

Koefisien determinasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.461[a]	.213	.156	1104001116930.10350

a. Predictors: (Constant), X

Tabel 4.8

Koefisien jalur penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14816078893	1364643018		10.857	.000
	Y	.003	.001	.666	3.341	.005

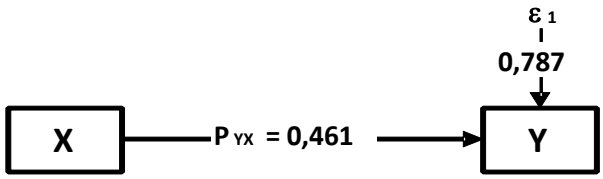
a. Dependent Variable: Z

Tabel 4.9
Koefisien determinasi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi

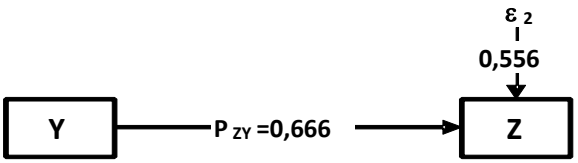
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666[a]	.444	.404	4538695.39502

a. Predictors: (Constant), Y



Gambar 4.3
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama



Gambar 4.4
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua